

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembangunan nasional ada salah satu aspek penting yang nantinya akan menjadi tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pembangunan yang mantap, adil, dan merata, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target dalam mencapai tujuan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga pemerataan pendapatan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga terdapat masalah dari beberapa faktor seperti salah satunya yaitu kebijakan pemerintah itu sendiri yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan

juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000:5).

Pemanfaatan potensi daerah merupakan hal mutlak dalam pembangunan ekonomi. Potensi daerah yang dikelola secara baik akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Efek lain dari pengelolaan yang baik dalam potensi daerah tersebut, yaitu pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan masyarakat menjadi salah satu indikator untuk menilai sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat seringkalisebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembanguna ekonomi. (Prishardoyo 2008)

Pembangunan daerah dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat,

jasa perusahaan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya, yang menjadi kategori secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator keberhasilan.

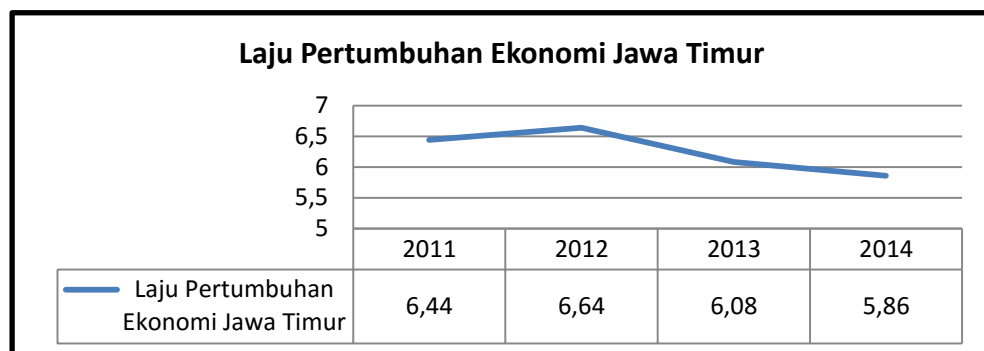
Menurut Lincoln Arsyad 1999, setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumberdaya yang ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang ditetapkan dan berhasil pada suatu daerah yang belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah menjadi bukti kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun daerah dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004

dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah harapannya adalah pemerintah daerah dapat mengelola rumah tangganya sendiri untuk terus membangun daerahnya dengan konsekuensi pemerintah daerah beserta perangkatnya harus bekerja keras agar mampu mencapai apa yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik yang unik dengan mengandalkan industri pengolahan. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2014 dengan 5.86 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,06 persen.

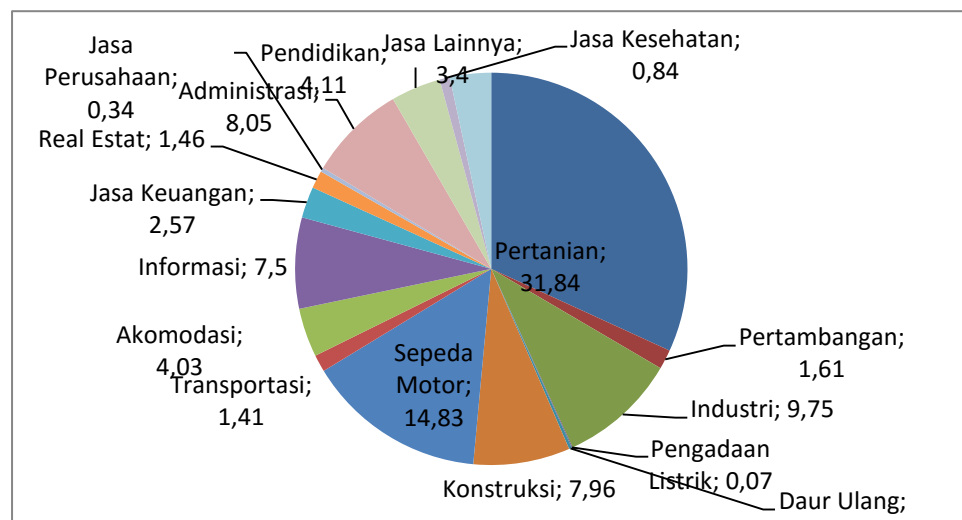


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur*

**GAMBAR 1.1**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur  
2011 – 2014 (persen)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan selama tahun 2011 – 2014, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memiliki kecenderungan meningkat. Di tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,44 persen kemudian meningkat ditahun 2012 menjadi 6,64 persen dan selanjutnya pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,86 persen.

Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, dan berada pada ketinggian antara 60 sampai dengan 1.660 meter diatas permukaan laut. Magetan merupakan kabupaten terkecil ke dua se Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh Kabupaten Magetan 688,85 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 696.124 jiwa.



Sumber: BPS Kab. Magetan 2014

### GAMBAR 1.2

Kontribusi Kategori/Lapangan Usaha Terhadap PDRB tahun 2014

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi kontribusi PBDB unggulan di Kabupaten Magetan. Ditahun 2014 saja, 31,84% PDRBnya disumbang dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, kedua

adalah dari sepeda motor dengan 14,83%, dan ketiga adalah dari industri pengolahan dengan besaran 9,75%.

Aktifitas ekonomi yang terus berjalan secara berkesinambungan memberi dampak terhadap perubahan struktur ekonomi. Pada periode 2010-2014 peranan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 34,07% ditahun 2010 menjadi 31,84% pada tahun 2014. Walaupun peranannya cenderung turun, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tetap menjadi basis ekonomi masyarakat Magetan mengingat tingginya penyerapan pada kategori ini. Penyerapan terendah ada pada katogeri pengadaan listrik dan gas yang pada tahun 2010 sebesar 0,06% meningkat ditahun 2014 sebesar 0,07%.

Kabupaten Magetan merupakan daerah potensial, oleh sebab itu selain penjelasan diatas yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pemenuhan ekonomi tersebut harus berorientasi pada penambahan pendapatan. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus mampu memfokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan yang memiliki dampak terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Penentu Sektor Unggulan Pembangunan Daerah dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus Kabupaten Magetan Tahun 2010-2014)”**.

**B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada mengkaji sektor ekonomi potensial yang dapat mendukung pengembangan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magetan dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan data tahun 2010-2014.

**C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diteliti, yaitu :

1. Sektor manakah yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Magetan.
2. Sektor apa yang menjadi basis untuk dikembangkan sebagai penunjang ekonomi Kabupaten Magetan.
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan bantuan analisis SWOT.

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor apa yang menjadi basis untuk dikembangkan sebagai penunjang ekonomi Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui sektor manakah yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan bantuan analisis SWOT.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan dan implementasi teori-teori yang diterima pada saat kuliah di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Magetan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terutama dalam bidang ekonomi.